**BAB I**

**PENDAHULUANN**

1. **1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode esuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi. Hal tersebut bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan leh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Rencana Strategis Kecamatan Bontomanai tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan bontomanai pada dasarnya dilatar belakangi oleh kondisi yang diinginkaan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Bontomanai, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boantomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026. Renstra Kecamatan Bontomanai memuat kondisi yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021 - 2026.

Berikutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.17/2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Kecamatan Bontomanai Tahun Anggaran 2022 akan menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Bontomanai Tahun Anggaran 2022 yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022. Lebih jelas gambaran tentang Renstra Kecamatan Bontomanai dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagai ditunjukkan pada **gambar 1.1**

RENSTRA

K / L

RENJA

K / L

RKA

K / L

Rincian

APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

RPJP

NASIONAL

APBN

RAPBN

RKP

RPJM

NASIONAL

Pedoman Dijabarkan Pedoman

RPJD

DAERAH

APBD

RAPBD

RKPD

RPJM

DAERAH

RESNTRA

K / L

RENJA

Kecamatan

RKA

Kecamatan

Rincian

APBD

**Gambar 1** Hubungan Renstra Kecamatan Bontomanai dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kecamatan Bontomanai merupakan kecamatan pada wilayah timur berbatas dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian selatan berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagian barat berbatas dengan Kalimatan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Karena hal ini lah maka Kecamatan Bontomanai menjadi strategis dalam posisi geografisnya.

**1. 2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pernagkat Daerah.

**1. 3. Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud

Rencana strategis / Restra Kecamatan Bontomanai Tahun 2021 – 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang termuat dalam UU No. 25 Tahun 2004.

Rencana strategis Kecamatan Bontomanai Tahun 2021 - 2026 ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang merupakan hasil Musrenbang Tingkat Desa yang kemudian disimpul dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Bontomanai dan kemudian dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Renstra Kecamatan Bontomanai Tahun 2021 - 2026 ini juga menjadi harapan agar membatasi potensi pengelolaan yang tidak tepat sasaran, dan potensi penyalah-gunaan sumber daya serta memastikan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, meliputi:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah di Kecamatan Bontomanai dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan / sub kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas pada pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparatur dan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal

.

1.3.2. Tujuan

a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;

c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;

d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;

e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;

f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasilambena supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;

g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;

h. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;

i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1. **4. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, beberapa pengertian pokok istilah „terminologi‟ dan kata kunci „key words‟ yang digunakan dan sistimatika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI

Memuat informasi tentang peran ( Tugas dan Fungsi ) Kecamatan Bontomanai dalam penyenlenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Pernagkat Daerah dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontomanai periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Bontomanai ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMANAI

Dalam bab ini dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dalam bab ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Bontomanai 2021 – 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bontomanai Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumasan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontomanai dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bontomanai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontomanai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, pegawai . serta para Kepala Desa di lingkup Kecamatan Bontomanai serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis.

**BAB II**

**GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontomanai mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Bontomanai :

**2. 1. Tugas**

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. Melaksanakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
15. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
7. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
8. Mengelola administrasi umum;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
10. Mengelola administrasi keuangan;
11. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
12. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
7. Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
8. Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
9. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
10. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
11. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
12. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
13. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
14. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat;
15. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat;
16. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
17. Menyusun neraca keuangan Camat;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Mengajukan pertimbangan hukum menurut kebutuhan;
8. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
9. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
10. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
11. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
12. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
13. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
14. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
15. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
11. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
12. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
7. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
8. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
9. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
11. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
12. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
13. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegitan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
9. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
10. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
12. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
13. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekomomian;
14. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
15. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
16. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
17. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
18. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
19. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
20. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
21. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
7. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
8. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
9. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
10. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
9. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
10. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Struktur Organisasi**

**C A M A T**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KA. SUBAG**

**UMUM, KEPEGAWAIAN & KEUANGAN**

**KA. SUBAG**

**HUKUM, PERENCANAAN, & PELAPORAN**

**SEKSI PEMERINTAHAN**

**SEKSI**

**TRANTIBUM**

**D E S A**

**D E S A**

**D E S A**

**SEKSI**

**P M D**

**SEKSI**

**EKBANG**

**SEKSI**

**KESOS**

Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontomanai

**Fungsi Kecamatan**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

.**2. 2. Sumber Daya Kecamatan Bontomanai**

Data PNS Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | | **PROSENTASE** | |
| **PNS** | **CPNS** | **PNS** | **CPNS** |
| 1 | S2 | 1 | 0 | 11,11% | 0 |
| 2 | S1 | 3 | 0 | 33,33 % | 0 |
| 3 | D3 | 2 | 0 | 22,22 % | 0 |
| 4 | SLTA | 3 | 0 | 33,33 % | 0 |
| 5 | STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | 9 | 0 | 100 % | 0 |

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Gol. Ruang** | **Tingkat Pendidikan Formal (orang)** | | | | | | | | **JML** |
| **S2** | **S1** | **D3** | **D2** | **D1** | **SLTA** | **SLTP** | **SD** |
| 1 | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | IV/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | IV/a | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | III/d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | III/c | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | III/b | -- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | III/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | II/d | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 9 | II/c | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | II/b | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | II/a | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Jumlah | | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 9 |

Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bontomanai meliputi gedung kantor dan perlengkapannya

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bontomanai disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Merk/ Type | tahun pembeli an | Asal usul | Keterangan | |
| Kondisi | Fisik |
| 1 | Mesin Proses Apung Lain-lain | yanmar | 2014 | Pembelian | RUSAK BERAT | Mesin Kapal 3 Unit.. |
| 2 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | Toyota / Rush S MT F 700 | 2007 | Pembelian |  | Sekretariat Daerah |
| 3 | Sepeda Motor | Yamaha / Vixision | 2013 | Pembelian |  |  |
| 4 | Sepeda Motor | yamaha / Mio | 2013 | Pembelian |  |  |
| 5 | Sepeda Motor | Zusuki / Thunder 125 N | 2007 | Pembelian | RUSAK RINGAN | FISIK ADA |
| 6 | Sepeda Motor | zusuki F1 / SHOGUN 125 | 2007 | Pembelian |  |  |
| 7 | Sepeda Motor | YAMAHA / MIO M3 125 CC | 2015 | Pembelian |  |  |
| 8 | Sepeda Motor | Yamaha / Yamaha New Mio M3 125 | 2016 | Pembelian |  |  |
| 9 | Sepeda Motor | Yamaha / Mio Soul GT AKS SSS | 2018 | Pembelian |  |  |
| 10 | Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain | KAISAR KAISAR / KAISAR TRISEDA | 2015 | Pembelian | RUSAK RINGAN | ALAT ANGKUT RODA 3 |
| 11 | Kapal Motor | kapal Kayu / Kapal motor | 2014 | Pembelian | RUSAK BERAT | Kapal motor angkutan Mahkota Pasilambena |
| 12 | Filling Besi/Metal | Brother / - | 2007 | Pembelian |  |  |
| 13 | Lemari Makan | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 14 | Lemari Kayu | - / - | 2004 | Pembelian |  |  |
| 15 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | - | 2009 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 16 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | GOLD POSTUREMATIC | 2018 | Pembelian |  |  |
| 17 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | PILLO AMERICAN | 2018 | Pembelian |  |  |
| 18 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 19 | Meja Rapat | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 20 | Meja Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 21 | Meja Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 22 | Meja Makan | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 23 | Meja Makan | - | 2018 | Pembelian |  | Meja Makan dan Kursi Makan |
| 24 | Kursi Rapat | Futura | 2014 | Pembelian |  | Kursi Rapat (1 Paket. ) 30 Buah. |
| 25 | Kursi Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 26 | Kursi Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 27 | Kursi Tamu | - | 2008 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK TIDAK ADA |
| 28 | Kursi Tamu | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 29 | Kursi Biasa | - | 2008 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK TIDAK ADA |
| 30 | Tenda | Tenda Terowongan | 2017 | Pembelian |  | Tenda Terowongan |
| 40 | Sofa | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 31 | Lemari Pakaian | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 32 | MOUBILER LAINNYA | - / - | 2004 | Pembelian |  |  |
| 33 | Alat Pendingin Lain-lain | Sharp | 2011 | Pembelian |  | Kulkas Serbaguna.. |
| 34 | Alat Pendingin Lain-lain | - | 2011 | Pembelian |  | Kulkas Satu Pintu |
| 54 | Televisi | Panasonik | 2008 | Pembelian |  |  |
| 35 | Sound System | BMB Audio Sistem / CS 450 V | 2014 | Pembelian |  | Sound Syistim untuk aula |
| 36 | Lap Top | Sony | 2013 | Pembelian | RUSAK RINGAN | FISIK ADA |
| 37 | Lap Top | Accer | 2014 | Pembelian |  |  |
| 38 | Lap Top | ACCER / LAKTOP ACCER | 2015 | Pembelian |  |  |
| 39 | Lap Top | LENOVO ULTRABOOK YOGA 13 | 2015 | Pembelian |  |  |
| 40 | Lap Top | ACCER | 2016 | Pembelian |  | LAPTOP |
| 41 | Lap Top | Lenovo V330-6WID | 2018 | Pembelian |  |  |
| 42 | Lap Top | Lenovo IP320 | 2018 | Pembelian |  |  |
| 43 | Lap Top | Ip330 Lenovo / Ip330 Lenovo | 2019 | Pembelian |  |  |
| 44 | Lap Top | Ip320 Lenovo / Ip320 Lenovo | 2019 | Pembelian |  | SEKCAM |
| 72 | Printer | Canon IP 2770 / IP 2770 | 2014 | Pembelian |  | Printer Canon |
| 73 | Printer | CANON MP 280 / MP 280 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 74 | Printer | CANON / MP 280 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 45 | Printer | CANON / IP 2770 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 46 | Printer | Hp Deksjet / - | 2007 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 48 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | Futura | 2014 | Pembelian |  |  |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Futura / Sandaran Tinggi | 2014 | Pembelian |  |  |
| 50 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Brother / - | 2007 | Pembelian |  |  |
| 51 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Brother | 2014 | Pembelian |  | Lemari Arsip 1 Buah |
| 52 | Proyektor + Attachment | Sony / VPL DX102HDMI | 2015 | Pembelian |  | 1. LCD DAN LAYAR SONY  LCD DAN LAYAR ( PROYEKTOR ) |
| 53 | Microphone/Wireless Mic | - | 2009 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 54 | Microphone/Wireless Mic | VISHIBA / PRO VT-U1009NEW | 2015 | Pembelian |  |  |
| 55 | Professional Sound System | Yamaha | 2012 | Pembelian |  | Keyboard Elekton |
| 56 | Camera Electronic | EOS 1500D / GS1-128 | 2019 | Pembelian |  | CAMAT |
| 57 | Amplifier | DA - 2000 Pro / ICKC 0920 | 2014 | Pembelian |  |  |
| 93 | Sound System | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 58 | Handy Talky | Morgen / MGH.8 | 2017 | Pembelian |  |  |

Tabel 2.3. Tabel Data asset

**2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomanai**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bontomanai berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bontomanai periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontomanai dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Bontomanai ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai Tahun 2016-2021 (TC.23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator lainnya | Terget Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada tahun ke- | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah RW tertib administrasi |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100% |
|  | * Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi) |  |  |  | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | * Pembinaan Desa ( Desa terbaik) |  |  |  | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|  | * SOP bidang pemerintahan yang tersusun |  |  |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan |  |  |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | * Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun |  |  |  | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 30% |
|  | * % PNS yang mendapat hukuman disiplin |  |  |  | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun |  |  |  | 90 % | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 80 % | 80 % | 80 % | 85 % | 85 % | 88.89 % | 100 % | 88.89 % | 89.47 % | 89.47 % |
| 3 | Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % wajib KTP yang memilki KTP |  |  |  | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 100 % | 98.90 % | 97.83 % | 96.77 % | 95.74 % |
|  | * Indeks kualitas masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | * Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun |  |  |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Terbinanya kader POSYANDU dan PKK |  |  |  | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | * % sekolah yang menerapkan UKS |  |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | * Jumlah insiden akibat konflik agama |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * SOP lingkup pendidikan yang tersusun |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 5 | Meniingkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah UKM yang aktif |  |  |  | 3 unit | -3 unit | -3 unit | 1 unit | 3 unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 66.67 % |
|  | * Jumlah Koperasi aktif |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | * SOP bidang EKBANG tersusun |  |  |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | * Jumlah program kemitraan yang terjalin |  |  |  | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100% |
| 6 | Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun |  |  |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 7 | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dam aman dalam kehidupan bermasyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % penurunan pelanggaran K3 |  |  |  | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * % penurunan illegal logging |  |  |  | 80 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * % penurunan illegal fishing |  |  |  | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 66.67 % | 66.67 % | 50 % | 50 % | 50% |
|  | * SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun |  |  |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja pemerintah dinilai dalam 2 hal :

Pertama : capaian kinerja

Kedua : laporan keuangan.

Capaian kinerja telah diuraikan sebagaimmana pada table sebelumnya, sedangkan laporan keuangan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai tahu 2016-2021 (TC.24)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran Tahun ke-  (000) | | | | | Realisasi Anggaran Tahun ke-  (000) | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Tidak Langsung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Hibah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Langsung | 731.800 | 750.000 | 1.059.325 | 793.587 | 643.789,187 |  |  |  |  |  |  | 2.49 | 41.24 | -25.09 | -18.88 | -0.06 |  |
| 1. Belanja Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja barang dan Jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

1. **Tantangan**

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Bontomanai dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontomanai sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat eletrivikasi di Kecamatan bontomanai masih rendah pada posisi 28,72% dari jumlah ruah tangggah yang ada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Desa/Kelurahan** |  | **Pengguna Listrik** |  | **Bukan Pengguna** |
|  | **PLN** | **Non PLN** | **Jumlah** | **Listrik** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Polebunging | - | 405 | 405 | - |
| 2. Barugaia | - | 233 | 233 | - |
| 3. Parak | - | 384 | 384 | - |
| 4. Kaburu | - | 258 | 258 | 58 |
| 5. Jambuia | - | 568 | 568 | - |
| 6. Mare-Mare  7. Bonea Makmur  8. Bonea Timur  9. Bontokoraan  10. Bontomarannu |  | 242 | 242 | - |
| **Bontomanai** | **-** | **2 090** | **2 090** | 58 |

* + - * Data BPS Pasilambena Dalam Angkat 2020

Tabel 2.6. Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasilambena Tahun 2019

1. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan saran transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasilambena namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rnagka meningkatnkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasilambena, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasilambena.

1. Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontomanai. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontomanai secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengna margin keuntungan yang juga relative kecil.

1. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitasi ketenaga kerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh ti gkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

1. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas meyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Bontomanai.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desa | | kelompok Pertokoan | Pasar dengan Bangunan Permanen | Pasar dengan Bangunan Semi | Pasar Tanpa Bangunan |
|  |  |  |  |  |  |
| -1 | | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 1 | Polebunging | - | - | - | - |
| 2 | Parak | - | - | 1 | - |
| 3 | Barugaia | - | 1 | 1 | - |
| 4 | Janbuia | - | - | - | - |
| 5 | Mare-Mare | - | - | - | - |
| 6 | Kaburu | - | - | - | - |
| **Pasilambena** | | **-** | **1** | **2** | **-** |

* + - * Data BPS Bontomanai Dalam Angka 2020

Tabel 2.7. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Bontomanai, 2019

1. **Peluang**

Sebagaimana disetiap tantangan maka aka nada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Bontomanai

1. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih standar dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memliki peluang yang baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Bontomanai mendapat harga yang normal di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.
2. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
3. Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
4. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfatatkan secara optimal.
5. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Dengan 3 Pilar dan 1 Program Unggulan :

***3 Pilar :***

***Kawasan Ekonoi Khusus Pariwisata***

***Kawasan Industri Perikanan Terpadu***

***Kawasan Distribusi Barang dan Jasa***

***1 Program Unggulan :***

***GERBANG SARI ; Gerakan Membangun Desa Mandiri***

**BAB III**

**PERRMASALAHAN DAN ISU-SIU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMANAI**

**3. 1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan** **Bontomanai**

Kecamatan Bontomanai yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 2 desa yang terletak di 2 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Bontomanai menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secapara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tata kelola organisasi dan manajemen pemerintahan serta profesionalitas ASN | Optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat yang sepenuhnya belum terlaksana | 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik  2. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani  3. Perijinan yang masih dilaksanakan oleh instansi teknis yang jangkauannya jauh dari wilayah kecamatan |
|  |  | Optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu |
| Maksimalisasi tingkat capaian keterisian data  Monografi dan profil kecamatan yang belum lengkap | Data kelengkapan monografi dan profil kecamatan yang bersumber dari data profil desa yang belum lengkap |
| Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes | 1. Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan belum terlaksana dengan baik. 2. Laporan pelaksanaan pembangunan desa yang belum terkoordinasikan dengan rutin 3. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang belum terlaksana dengan serius |
|  |  |  |  |
| 2 | Ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3) dalam  masyarakat | Masih adanya Kriminalitas di wilayah kecamatan | 1. Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesua 2. Sosialisasi kesadaran hukum yang belum terlaksana dengan baik dan rutin |
| Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif | Keterbatasan anggaran penggunakan untuk pembangunan poskamling |
| 3 | Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelompok yang rentan | Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi  dan aktif di desa yang maish rendah | 1. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa 2. Motivasi partisipasi keberdayaan masyarakat yang masih terkooptasi dengan orientasi pemenuhan kebutuhan hidup |
| - Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat  - Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan. | 1. Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesn keperpihakan 2. Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa 3. Sosialiasi bahwa tidak sepantasnya terus-menerus merima bantuan. |
| Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama | 1. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan 2. Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan |

Disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bontomanai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai. Peta kendala-kendapa tersebut, sebagai berikut :

1. Sumber daya Aparatur sebagai instrument utama pelayanan masyarakat relative belum tersedia memadai.

Sebagaimana yang dipaparkan secara umum di Bab sebelumnya perihal gambaran pelayanan Kecamatan Bontomanai bahwa ketersediaan SDM Aparatur yang tidak memadai. Dengan kondisi geografis kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.380 jiwa tentunya membutuhkan presentase ketersediaan SDM Aparatur yang ideal.

Kondisi SDM Aparatur di Kantor Kecamatan Bontomanai saat ini sebanyak 20 PNS dan 17 PTT dengan beban tugas yang cukup berat menjadi permasalahan tersendiri dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai.

1. Kualitas koordinasi lintas sektor instansi pemerintah yang relatih kurang

Dampak dari keterbatasan ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan Bontomanai adalah pada kualitas koordinasi antar sektor pemerintah yang relative kurang. Hal ini tercermin dari kinerja beberapa urusan pemerintah yag tidak optimal, antara lain : pendidikan, kesehatan, energy dan sumber mineral, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, terutama pada suksektor telekomunikasi yang terbatas.

1. Alokasi anggaran yang belum ideal

Dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayah kerja yag ada di Kecamatan Bontomanai alokasi anggaran yang selama ini dikelolah Kecamatan Bontomanai relatif tidak ideal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Gambar 10. Tabel Perkembangan Alokasi Anggaran Kecamatan Bontomanai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Aloksi Angaran | % |
| 2015 | 931,800,000 |  |
| 2016 | 731,800,000 | *-21.46%* |
| 2017 | 750,000,000 | *2.49%* |
| 2018 | 1,059,325,000 | *41.24%* |
| 2019 | 793,587,800 | *-25.09%* |
| 2020 | 643,789,187 | *-18.88%* |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang masih relatif kecil

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembnaan keasyarakatan dapat dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dan segenap komponen lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bontomanai, dapat disimpulkan bahwa kesadaran partisipatif masyarakat masih relative rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan cukup berat, sehingga untuk meluangkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas kegiata pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

Tebel 3.2 Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontomanai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interperstasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi |  |  |  |
|  | * Jumlah RW tertib administrasi | = | Target RW hanya 1 | Pembinaan yang berkelanjutan dan terfokus |
|  | * Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi) | = |  | Data profil yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * Pembinaan Desa ( Desa terbaik) | =  (40 rasio 5 thn) |  |  |
|  | * SOP bidang pemerintahan yang tersusun |  |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
| 2 | Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja |  |  |  |
|  | * SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun | = |  | Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * % PNS yang mendapat hukuman disiplin | = |  | Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif |
|  | * Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun | 89.47 |  | Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif |
| 3 | Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat |  |  |  |
|  | * % wajib KTP yang memilki KTP | 95.74 | Jarak ke dinas teknis | Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa |
|  | * Indeks kualitas masyarakat |  |  |  |
|  | * Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
| 4 | Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat |  |  |  |
|  | * Terbinanya kader POSYANDU dan PKK | = |  | Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa dan petugas Posyandu |
|  | * % sekolah yang menerapkan UKS | = |  | Menjadi prioritas di sekolah |
|  | * Jumlah insiden akibat konflik agama | = |  | Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan |
|  | * Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan | = | Ketersediaan pendanaan | Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa |
|  | * SOP lingkup pendidikan yang tersusun |  |  |  |
| 5 | Meniingkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan |  |  |  |
|  | * Jumlah UKM yang aktif | 66.66  (33.34 ratio 5 thn) | Kegiatan pelatihan yagn sangat terbatas | Potensi sumber daya alam yang tersedia |
|  | * Jumlah Koperasi aktif | 0 |  |  |
|  | * SOP bidang EKBANG tersusun | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
|  | * Jumlah program kemitraan yang terjalin | =  (40 ratio 5 thn) | Akses informasi terbatas karena keterbatasan jarak | Dukungan pemerintah desa dalam membangun UKM di desanya |
| 6 | Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle) |  |  |  |
|  | * Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan | 0 | Keterbatasa lahan |  |
|  | * Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola | 0 | Keterbatasan lahan |  |
|  | * SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun | = |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |
| 7 | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dam aman dalam kehidupan bermasyarakat |  |  |  |
|  | * % penurunan pelanggaran K3 | = | Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang | Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait |
|  | * % penurunan illegal logging | = | Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah | Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait |
|  | * % penurunan illegal fishing | 50 | Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah | Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait |
|  | * SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun |  |  | SOP yang sudah tersedia sebelumnya |

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas (Tabel TB.36)

1. **2. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026**

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasilambena sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

***“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.***

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
5. Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu:
6. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:

Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;

Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;

Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;

Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:

a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;

b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;

c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;

d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;

e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;

f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;

g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:

a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;

b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;

c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;

d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;

e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi yang diajukan oleh kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
2. Merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan
3. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

**.3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra**

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2016 – 2021, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan dilantik, Dokumen RPJMD sudah harus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung kooordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengeoptimalkan partisipasi masyarakat, dan.
5. Menjami terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dijiwai semangat memperkuat sibergi antar bidang.

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021. Pada dasarnya pembangunan disetiap bidang pemerintahan, untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pemangunan dibidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efiensi dan hasil maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap unit kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang melaksanakan pembangunan daerah di setiap urusan bidang pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat local maupun pusat maupun provinsi sekaligus mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021 ini juga diarahkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah daerah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistic dan tidak berfrakmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sbenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya SKPD untuk dapat merealisasikannya secara sungguh – sungguh demi kepentingan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas minat ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi preoritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Selanjutnya, kebijakan umum RPJMD 2016-2021 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayan pada tahun 2025 yaitu *“ mewujudkan Kabupaten Maritim yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”*

Penyusunan kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021 dikelompokan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan daerah, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik sarana dan prasarana ; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepressntasikan misi 1, 2, 3, dan 7. Kebijakan umum dalam bidang ekonomi, merepresentasikan ke 4, 5, dan 6. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana merepresentasikan misi ke 4, 5, dan 6

Kemudian, kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 2. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewadahi urusan urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam ke-7 misi yang ada. Penyususnan kebijakan umum dalm klpompok bidang utama pembangunan daerah ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masig-masing bidang pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam segala aktifitas masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktifitas kehudupan.
3. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi melalui pembinaan dan penigkatan pemberdayaan penduduk miskin.
4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan income perkapita, pengendalian harga, dan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita.
5. Menuntaskan penduduk buta aksara melalui peningkatan pembinaan keaksaraan.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan melalui peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperolah pendidikan yang bermutu da terjangkau di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
7. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik.
8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mencegahan dan penanggulangan berbagai penyalit menular dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan menajemen kesehatan.
9. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga.
10. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kamu perepuan dalam setiap asfek kehidupan.
11. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
12. Meningkatkan pembinaan kelolahragaan bagi pemudaa dan masyarakat melalui pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan.
13. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar melalui : mengoptimalkan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan, serta perluasan lapangan kerja.
14. Meingkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman tradisi dan nilai-nilai kearifan local dalam segala aktiitas masyarakat melalui pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan local kedalam setiap aktifitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.
15. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi.
16. Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan trasportasi.
17. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan.
18. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui; pengoptimalan dulungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan.
19. Meningkatkan minta dan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hokum bgi investor.
20. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK pariwisata melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak yang terkait, penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan ( bagian selatan Pulau Selayar).
21. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry terpadu, dan pengembangan industry kapal rakyat.
22. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dana dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistic melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistic pada kawasan yang telah ditetapkan ( bagian utara Pulau Selayar).
23. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebaagai kawasan industry perkapalan strategis nasional melalui peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan pendukung apda kawasan industry perkalapan strategis nasional.
24. Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak agar Kabupaten Kepulaua Selayar dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai salah satu basis utama pertahanan Negara.
25. Melaksanakan revolusi tani melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
26. Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi melalui : Penetapan Pulau Tamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali, penetapan pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul dan lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pada usaha ternak rakyat.
27. Mengembangkan kawasan hutan rakyat melalui pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat.
28. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan.
29. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawaasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkunga (AMDAL).
30. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.
31. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
32. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi melalui penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut, dan udara.
33. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi.
34. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemungkiman melalui pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan pemungkiman.
35. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energy melalui penyediaan energy listrik bagi rumah tangga dan industry.
36. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungn dan stranportasi antar pulau melalui penyediaan infrastruktur ke pelabuhan.
37. Mejadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daereh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pelabuhan perikanan nasional.
38. Kebijakan Umu Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan
39. Meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama melalui penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama.
40. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran, peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas manajemen asset daerah.
41. Meningkatakan kualias koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah.
42. Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk di dalamnya penerapan punishment dan reward melalui penerapan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) yang transparan, konpetiitif, dan berbasis merit system.
43. Menyelenggaarakan pelayanan public yang berkualitas melalui perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
44. Memellihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif meallui peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
45. Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi local melalui pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penetapan transmigran local.
46. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda pelalu peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
47. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme, aparat pemerintah desa dalam penyelengaaraan pemerintahan desa dan pelayanan public melalui penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar komfetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

**.3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.**

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Pengembangan keterpaduan system perkotaan dan pedesaan.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan haak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruanggg yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yahg meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut, dan lain-lain.
5. Pemanfataan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelalutan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutihan pangan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata.
9. Pengembangan kawasan industry perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local SDM untk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah Kabupaten.
12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten.

**.3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis**

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal
2. Kekuatan

* Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
* Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelauatan yang saangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.

1. Kelemahan

* Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
* Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
* Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tinggkat kecamatan maupun desa yang berorintasi pada pengambangan potensi kelauatan juga potensi perkebunan dll.
* Masih terbatasnya fasilitas kerja.
* Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
* Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

1. Analisis Lingkungan Eksternal
2. Peluang

* Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
* Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
* Potensi investasi yang relative besar dan prosfektif terutama di sektor perikanan dan pariwisata (bahari).

1. Tantangan

* Kondisi geografis Kecamatan Bontomanai yang wilyahnya sebagaian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau.
* Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasilambena yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
* Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

.4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontomanai

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Bontomanai akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurung waktu 1 sampai 5 tahu ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontomanai tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Bontomanai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dikordinasikan oleh pemerintah Kecamatan Bontomanai (T1-T3) | Meningkatnya efektivitas kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, penerapaan dan penegakan peraturan perundang-Undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kacamatan Bontomanai (T1-T2; S1-S3)  Meningkatnya efektivitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (T3;S5-S6) | Jumlah kegiatan Pelayanan Masyarakat yang dikordinasikan/ difaslitasi  Jumlah kegiatan pengekaanan peraturaan dan perundangan yang dikoordinasikan/difasilitasi  Jumlah desa dan kelurahan yang dibina dalam penyelengraaan pemerintah | 5  5  6 | 8  8  6 | 10  10  6 | 12  12  6 | 15  15  6 |
| 2. | Meningkatkan efektivitas kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan dalam urusan Pemerintahan bidang pemerintahan, ekbang, kesos dan trantib.(T4-T10) | Meningkatnya efektivitas kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, admn kependudukan dan capil, Pemerintahan Umum. (S7-S8-S9)  Meningkatnya efektivitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada bidang ekonomi dan pembangunan untuk urusan PU, perumahan, penataan ruang, pertanian, perikanan, UKM,Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup,( S10-S-11-S12-S15)  Meningkatnya efektivitas kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada bidang Kesejahteraan Sosial untuk urusan kesehatan, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, keagamaan, pemuda dan olah raga,KB dan KS, (S13-S14)  Meningkatnya efektivitas kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada bidang kesbangpol serta ketertingan dan ketentraman.(S13-S14). | Jumlah akta jual beli tanah yang diterbitkan dan jumlah sengketa tanah yang difasilitasi penyelesaiannya  Jumlah satuan informasi kependudukan yang dihasilkan  Jumlah unit pembangunan sarana/prasrana pekerjaan umum yang diawasi dan dikordinasikan  Jumlah IMB yang diterbitkan  Jumlah kegiatan pertanian dan perikanan yang diasilitasi  Jumlah pelaku usaha UKM yang diberi rekomendasi  Jumlah rekomendasi bidang pendidkan yang dihasilkan  Jumlah kejadian penyakit dan gizi buruk yang dilaporkan  Jumlah PMKS yang direkomendasikan mendaptkan penanganan  Jumlah data ketenagakerjaan yang dihasilakn  Jumlah nilai-nilai budaya lokal, sejarah lokal, lembaga adat, lembaga keagama-an yang difaslitasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.  Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang difasilitasi  Cakupan koordinasi penanganan konflik sosial dan pening-katan kesadaran kesatuan bangsa dan politik  Cakupan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keaman (K3) yang dikordinasikan/difaslitasi penangananya. | 10  3  20  25  20  20  3  5  300  1  7  5  100%  100% | 15  3  25  30  30  25  5  5  300  1  10  5  100%  100% | 20  3  30  35  35  30  5  5  300  1  12  5  100%  100% | 25  5  35  40  40  40  7  5  300  1  15  7  100%  100% | 30  5  40  50  45  45  9  5  300  1  15  10  100%  100% |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontomanai adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontomanai diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontomanai menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomanai.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontomanai yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontomanai agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | | |
| MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan reformasi birokrasi daerah | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | Meningkatkan pelayanan yang responsive disertai pendekatan inovaasi dan pemanfaatan teknologi informasi | Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompotensi aparatur. |
|  |  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan aktual. |
|  |  | Meningkatnya prosedur pelaporan system keuangan yang berbasis aktual melalui pendampingna dan meningkatkan pengawasan internal | Peningkatan SDM pegawai untuk lebih beradaptasi pada system keuangan yang diaplikasikan. |
| MISI II : Meningkatkan Kualitas Pembagunan Pedesaan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pedesaan | Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan | Mengoptimalkan produktifitas dan keberdayaan masyarakat desa seiring dengan meningkatkan koordinasi | Pengoptimalan koordinasi dengan instransi terkait dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan dengan pemerintah desa |
|  | Meningkatnya pengelolaan sumber daya lokal | Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal seiring dengan perluasan lapangan pekerjaan disertai dengan peningkatan pendapatan | Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa perihal sumber daya lokal yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan |

**MISI III : Meningkatan Kualitas Hidup Masyarakat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| Meningkatnya fasilitas pembangunan sumber daya manusia | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan minimal dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung secara profesional | Pendataan kebutuhan sarana dan prasaran serta peningkatan pembangunannya sebagai dukungan peningkatan pelayanan minmal | | |
|  |  | Optimalisasi peran perempuan terhadap pembangunan disertai dengan peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan | Mengoptimalkan kegiatan perempuan yang bersifat sosial ekonomi sebagai dukungan pembangunan ekonomi keluarga | | |
|  |  | Meningkatkan perilaku hidup sehat | Kegiatan kecamatan sehat yang lebih aktif dan nyata | | |
|  | Meningkatnya daya beli masyarakat | Optimalisasi sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal dan proyek padat karya | Mengoptimalkan pengelolaan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal | | |
| Misi ke IV : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| Mengoptimalkan pemanfaatn potensi kemaritiman | Meningkatkan usaha perikanan | Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan disertai dengan penciptaan nilai tambah melalui oprimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan | Membangunan sarana dan prasana di desa melalui koordinasi dan prioritas APBDes bidang perikanan | | |
|  | Meningkatkan usaha pariwisata | Memperkuat dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan disertai dengan meningkatkan daya tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi dan sumber daya manusia pariwisata | Meningkatkan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal melalui program ekonomi kerakyatan dan memfasilitasi pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal | | |
|  | Meningkatkan usaha perdagangan | Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kapasitas pelabuhan seiring meningkatkan jangkauan ketersediaan hub-hub sebagai tempat transit sambil meningkatkan kerja sama antara daerah | Memfasilitasi peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi | | |
|  |  |  |  | | |
| Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| Memantapkan jati diri keselayaran (T-17) | Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang selayar (S-27) | Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat | Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kerifan local kedalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan | | |
| Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| Meningkatkan Kualitas kehidupan sosial | Meningkatnya nlai aktualisasi nilai budaya dan keagamaan | Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Mendorong aktifitas adat dan budaya yang tetap berpegang pada nilai-nilai keagamaan | | |
| Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | | |  | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup | Menurunkan tinkat perusakan lingkungan hiidup dan penemaran serta menitigasi lingkungan sejalan denga penguatan koordinasi lintas sektor | Memfasilitasi kegiatan pengawasan lingkungan berbasis kearifan lokal | | |

**INDIKATOR KINERJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Formulasi Pengukuran** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Fasilitasi Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilombakan | ( Jumlah Desa Yang Diawasi / Jumlah Keseluruhan ) X 100% |
| Jumlah Budaya / Nilai Sejarah Yang Dibina Dan Dikembaangkan |
| Jumlah Kegiatan Pemuda Dan Olah Raga Yang Dibina |
| Jumlah Desa Sehat Yang Dibina |
|  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan, Pembinaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunnan | Jumlah Pelaku Usaha UMKM Yang Direkomendasikan | ( Jumlah Usulan Yang Diakomodir / Jumlah Semua Usulan Dalam Musrenbang ) X 100% |
| Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |
|  |  |  |  |
| 3 | Meningkatanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Desa Dengan Realisasi PBB Yang Mencapai Target |  |
| Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | ( Jumlah Permohonan Kependudukan Yang Dilayani / Jumlah Permohonan Yang Masuk ) X 100% |
| Presentase Pelayanan Adminstrasi Pertanahan | ( Jumlah Dokumen Yang Tersedia / Jumlah Permohonan Yang Masuk ) X 100% |
| Penataan Administrasi Asset / Kekayaan Daerah | ( Jumlah Dokumen Aset Yang Tersedia / Jumlah Dokumen Aset Yang Seharusnya ) X 100% |
|  |  |  |  |
| 4 | Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Jumlah Informasi Potensi Bencana Alam Yang Sampaikan Ke Masyarakat |  |
| Jumlah SDLH, Illegal Logging Dan Illegal Fishing Yang Diawasi |  |
| Presentasi Pelaksanaan Dan Penerapan Perda | (Jumlah Perda Yang Dilaksanakan / Jumlah Perda Yang Diserahkan Ke Kecamatan ) X 100 % |
| Presentasi Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | ( Jumlah Kasus Yang Ditangai / Jumlah Kasus Yang Dilaporkan ) X 100% |
|  |  |  |
| 5 | Meningkatnya Fasilitasi, Penyelenggaraan Layanan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi APBDes |  |
| Jumlah Desa Siaga |  |
| Jumlah desa yang diikutkan dalam lomba desa |  |
| Presentasi penurunan jumlah penderita gizi buruk | ( Jumlah penderita gizi buruk yang ditangani / jumlah penderita gizi buruk yang dilaporkan ) x 100% |
| Presentase penurunan jumlah temuan pada laporan keuangan desa | ( Jumlah temuan tahun diperiksa / jumlah temuan tahun sebelumnya ) x 100% |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontomanai di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

* 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksaananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* + 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   * 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontomanai. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomanai. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, bak dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
9. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
10. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | | **Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan** | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 1** | | **Tahun 2** | | **Tahun 3** | | **Tahun 4** | | **Tahun 5** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | | | |
| **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar--get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | | **Rp. (000.000)** | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1) | Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kapasitas organisasi pemerintahan (S-2) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tersedianya dokumen kinerja | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perecanaan | |  | 4 dok | 11.623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen RKA | |  |  |  | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | | 2.75 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen Perubahan RKA | |  |  |  | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | | 2.75 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersusunnya dokumen DPA | |  |  |  | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | | 6.875 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersusunnya dokumen Perubahan DPA | |  |  |  | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | | 6.875 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ | |  | 3 dok | 4.52 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | | 7.25 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | |  | 100% | 1052 | 100% | 1150 | 100% | 1250 | 100% | 1300 | 100% | 1350 | 1 | | 1350 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya laporan realisasi anggaran | |  | 1 dok | 7.22 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | | 6.625 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan realisasi fisik keuangan | |  | 2 dok | 8.84 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | | 13.25 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersusunnya laporan aset BMD | |  | 1 dok |  | 1 dok | 13.25 | 1 dok | 13.25 | 1 dok | 13.25 | 1 dok | 13.25 | 1 dok | | 13.25 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas lengkap | |  | 100% |  | 100% | 7.5 | 100% | 7.5 | 100% | 7.5 | 100% | 7.5 | 100% | | 7.5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tersusunnya informasi kepegawaian | |  | 100% |  | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | | 5 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemindahan Tugas ASN |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya SDM pegawai | |  | 100% | 30.261 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | | 25 | |  | Prov. Sul Sel |
|  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya penerangan kantor | |  | 100% | 1.716 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | | 2 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | |  | 100% | 27.7855 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | |  | 100% | 26.8175 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | | 22 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | |  | 100% | 5.7303 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |  | 100% | 3.4877 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | | 3.6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Bahan/Material |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya kunjungan tamu | |  | 100% | 25.5 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | | 20 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi | |  | 100% | 153.01 | 100% | 169.5 | 100% | 174 | 100% | 174 | 100% | 182.75 | 100% | | 182.75 | |  | Prov. Sul Sel |
|  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel | Tersedinya kelengkapan kantor | |  | 100% |  | 100% | 12 |  |  |  |  | 100% | 12 | 100% | | 12 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor | |  | 100% |  | 100% | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | |  | 100% |  | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya komudikasi, air dan listrik | |  | 100% | 24.6208 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | | 25 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedinya peralatan dan kelengkapan kantor | |  | 100% | 13.5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedinya jasa penlayanan umum kantor | |  | 100% | 165.8352 | 100% | 175 | 100% | 175 | 100% | 175 | 100% | 175 | 100% | | 175 | |  | Kec. Pslb |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Mebel |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin | |  | 100% | 43.14 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 19 | 100% | 20 | 100% | | 20 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Terpeliharanya aset tetap | |  |  |  | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Perbaikan gedung kantor | |  |  |  | 100% | 200 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | KECAMATAN | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal | |  |  |  | 6 desa | 9 | 6 desa | 9 | 6 desa | 9 | 6 desa | 9 | 6 desa | | 9 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1) | Meningkatnya kinerja SKPD (S-1) |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan | |  |  |  | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | | 10 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat | |  |  |  | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | | 10 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Tersinkronisnya kegiatan pemberdayaan masyarakat | |  | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | | 20 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat | |  | 2dok | 16.476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) | Meningkatnya kualitas pembinaan kemasyarakatan (S-12) |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya sinergi yang baik | |  |  |  | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | | 6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat | |  |  |  | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | | 6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) | Meningkatnya kualitas pembinaan kemasyarakatan (S-12) |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Meningkatnya kecintaan terhadap tanah air | |  | 2 kegiatan | 40.045 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | | 40 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) | Meningkatnya kerukunan antar suku dan antar agama (S-11) |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terciptanya kerukunan dalam masyarakat | |  |  |  | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1) | Meningkatnya kinerja SKPD (S-1) |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksanannya koordinasi forum pimpinan | |  |  |  | 1 dok | 9 | 1 dok | 9 | 1 dok | 9 | 1 dok | 9 | 1 dok | | 9 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan desa | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Terlaksananya pembinaan BPD | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksanannya asistensi apb desa | |  | 1 dok | 4.824 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Terfasilitasinya pembangunan kawasan yang ideal | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 4 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terciptanya ketenteraman dan ketertiban | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 4 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Terlaksananya musrenbang desa | |  |  |  | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | | 6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terfasiitasinya penegasan batas desa | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya pengawasan pembangunan kawasan desa | |  | 1 dok | 2.718 | 1 dok | 3 | 1 dok | 5 | 1 dok | 7 | 1 dok | 7.5 | 1 dok | | 7.5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | **1,689.67** | | **2,215.23** | | **2,012.73** | | **2,067.73** | | **2,139.98** | | | **2139.975** | |  | |  |

Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamat Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

**BAB VII**

**KINERJA**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Bontomanai menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontomanai dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontomanai akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontomanai dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
| **Tahun 1**  **2021** | **Tahun 2**  **2022** | **Tahun 3**  **2023** | **Tahun 4**  **2024** | **Tahun 5**  **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Angka Kemiskinan / Jumlah KK |  | 15% |  |  |  |  |  |
| 2 | Angka Pengangguran / Tenaga Kerja |  | 30% |  |  |  |  |  |
| 3 | Persentase Balita Gizi Buruk |  | 0% |  |  |  |  |  |
| 4 | Rata2 Jumlah Kelompok Binaan PKK |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jumlah Klub Olah Raga |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kepemilikan KTP |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 7 | Ratio Pasangan Berakte Nikah |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 8 | Kepemilikan Akte Kelahiran / 100 Penduduk |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 9 | Cakupan Peserta KB Aktif / KK |  | 65% |  |  |  |  |  |
| 10 | Ratio Absektor KB Baru / KK |  | 65% |  |  |  |  |  |
| 11 | Jumlah Grup Kesenian |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 12 | Penyelenggaran Festival Seni Dan Budaya |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Jumlah Organisasi Pemuda |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 14 | Persentase Penanganan Gangguan K3 Masyarakat |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 15 | Jumlah Poskamling Perjumlah Desa/Kelurahan |  | 18/6 Desa |  |  |  |  |  |
| 16 | Angka Kriminalitas |  | 1% |  |  |  |  |  |
| 17 | Pembinaan Dan Fasilitasi Pemantauan Ormas Dan LSM |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 18 | Penegakan Perda |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 19 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Perikanan |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 20 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 21 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pendidikan |  | 70% |  |  |  |  |  |
| 22 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pariwisata |  | 50% |  |  |  |  |  |
| 23 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum |  | 80% |  |  |  |  |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontomanai sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Bontomanai merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Bontomanai sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bontomanai Rencana strategis Kecamatan Bontomanai akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepualauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasilambena.

Polebunging, April 2021

**Camat**

**ZULFIKRI,S.STP**

Nip. 19790818 199711 1 002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelayanan Publik | Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi terhadap pelayanan | 1. Sarana dan prasarana pelayanan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang belum ada dukungan fisik. 2. SDM staff yang belum terupdate 3. Jumlah staff yang tidak memadai |
| 2 | Ekonomi (skala mikro) | Pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan yang belum termanfaatkan dengan optimal | 1. Pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan yang belum dikelola dengan baik dan serius sehingga hasil pertanian dengan kualitas yang baik belum dapat dicapai. 2. Pengelolaan peternakan yang masih menggunakan cara-cara tradsional attau konvensional, yaitu dengan cara digembalakan bukan dengan usaha peternakan serius. 3. Usaha kelautan atau perikanan masih dikelola oleh masyarakat dengan cara yang sangat sederhana dan menggunakan armada yang tradisional. 4. Diperlukan pergudangan untuk hasil pertanian dan perkebunan untuk menampung hasil saat musim tidak memungkinan untuk melakukan pelayaran 5. Diperlukan pabrik es yang berskala menengah agar hasil tangkapan dan saat pengiriman dapat terjamin kualitasnya. |
| 3 | Sosial | Tingkat kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah.  Motifasi untuk membuka lapangan kerja sendiri | 1. Tingkat pendidikan secara umum masih terbatas. 2. Tingkat keterampilan kerja yang masih sangat kurang, khususnya pada sektor pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan. 3. Masih mengandalkan sektor formal dalam mencari kerja. 4. Peningkatan SDM berupa pelatihan keterampilan untuk membuka lapangan kerja sendiri |
| 4 | Kesenian dan Budaya | Pengelolaan seni budaya yang dapat dijadikan ajar pariwisata berbasis kearifan lokal | 1. Pengembangan dan pembinaan seni budaya dan menggali kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan agama. 2. Pengembangan kelompok adat yang menjadi lembaga non pemerintah yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial bahkan masalah perekonomian yang berkembang dalam masyarakat 3. Pengembangan kepariwisataan yang berbasis kearifan lokal |